

KODE REKENING	URAIAN	NERACA AKHIR 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	KOREKSI		MUTASI/PENYESUAIAN		NERACA AKHIR 31 DESEMBER 2018	LAPORAN REALISASI ANGGARAN		LAPORAN OPERASIONAL	
			DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT		2017	2018	2017	2018
6.2	BELANJA TRANSFER BANTUAN KEUANGAN										
6.2.01	Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya										
6.2.01.02	Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota							-	-	-	-
6.2.01.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Semarang							-	-	-	-
6.2.01.02.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kendal							-	-	-	-
6.2.01.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Demak							-	-	-	-
6.2.01.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Grobogan							-	-	-	-
6.2.01.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Pati							-	-	-	-
6.2.01.02.06	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kudus							-	-	-	-
6.2.01.02.07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Jepara							-	-	-	-
6.2.01.02.08	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Rembang							-	-	-	-
6.2.01.02.09	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Blora							-	-	-	-
6.2.01.02.10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Pekalongan							-	-	-	-
6.2.01.02.11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Batang							-	-	-	-
6.2.01.02.12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Pemalang							-	-	-	-
6.2.01.02.13	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Tegal							-	-	-	-
6.2.01.02.14	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Brebes							-	-	-	-
6.2.01.02.15	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Banyumas							-	-	-	-
6.2.01.02.16	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Cilacap							-	-	-	-
6.2.01.02.17	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Purbalingga							-	-	-	-
6.2.01.02.18	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Banjarnegara							-	-	-	-
6.2.01.02.19	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Magelang							-	-	-	-
6.2.01.02.20	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Temanggung							-	-	-	-
6.2.01.02.21	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Wonosobo							-	-	-	-
6.2.01.02.22	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Purworejo							-	-	-	-
6.2.01.02.23	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kebumen							-	-	-	-
6.2.01.02.24	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Klaten							-	-	-	-
6.2.01.02.25	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Boyolali							-	-	-	-
6.2.01.02.26	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sragen							-	-	-	-
6.2.01.02.27	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sukoharjo							-	-	-	-
6.2.01.02.28	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Karanganyar							-	-	-	-
6.2.01.02.29	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Wonogiri							-	-	-	-
6.2.02	Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa										
6.2.02.01	Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa										
6.2.02.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Semarang										
6.2.02.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Kendal										
6.2.02.01.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Demak										
6.2.02.01.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Grobogan										
6.2.02.01.05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Pati										
6.2.02.01.06	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Kudus										
6.2.02.01.07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Jepara										
6.2.02.01.08	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Rembang										
6.2.02.01.09	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Blora										
6.2.02.01.10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Pekalongan										
6.2.02.01.11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Batang										
6.2.02.01.12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Pemalang										
6.2.02.01.13	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Tegal										
6.2.02.01.14	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Brebes										
6.2.02.01.15	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Banyumas										
6.2.02.01.16	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Cilacap										
6.2.02.01.17	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Purbalingga										
6.2.02.01.18	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Banjarnegara										
6.2.02.01.19	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Magelang										
6.2.02.01.20	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Temanggung										
6.2.02.01.21	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Wonosobo										
6.2.02.01.22	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Purworejo										
6.2.02.01.23	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Kebumen										
6.2.02.01.24	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Klaten										
6.2.02.01.25	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Boyolali										
6.2.02.01.26	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Sragen										
6.2.02.01.27	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Sukoharjo										
6.2.02.01.28	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Karanganyar										
6.2.02.01.29	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Wonogiri										
6.2.03	Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya										
6.2.03.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik							-	-	-	-
6.2.03.01.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik							-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA							184.322.478.397,00	237.092.321.943,00		
	SURPLUS/DEFISIT							#####	#####		
7.00	PEMBIAYAAN										
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN										
7.1.01	Penggunaan SILPA										
7.1.01.01	Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya										
7.1.01.01.01	Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya										
7.1.05	Penerimaan Kembali Piutang										
7.1.05.05	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya										
7.1.05.05.01	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya-Dana Talangan										
7.1.06	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya										
7.1.06.02	Penarikan Dana Bergulir										
7.1.06.02.01	Penarikan Dana Bergulir										
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN										
7.2.01	Pembentukan Dana Cadangan										
7.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan										
7.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan										
7.2.02	Penyertaan Modal Pengadaan/Investasi Pemerintah Daerah										
7.2.02.02	Penyertaan Modal Pengadaan Pada BUMD										
7.2.02.02.01	Penyertaan Modal Pengadaan Pada BUMD										
	PEMBIAYAAN NETTO										
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN							#####	#####		

KODE REKENING	URAIAN	NERACA AKHIR 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	KOREKSI		MUTASI/PENYESUAIAN		NERACA AKHIR 31 DESEMBER 2018	LAPORAN REALISASI ANGGARAN		LAPORAN OPERASIONAL	
			DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT		2017	2018	2017	2018
8.1.04.09.01	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO									-	-
8.1.04.09.07	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO									-	-
8.1.04.09.15	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LO									-	-
8.1.04.11	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO									-	-
8.1.04.11.01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO									-	-
8.1.04.12	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO									-	-
8.1.04.12.01	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan - LO									-	-
8.1.04.13	Pendapatan dari Pengembalian - LO									-	-
8.1.04.13.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO									-	-
8.1.04.13.06	Pendapatan dari Pengembalian Belanja Tahun Lalu - LO									-	-
8.1.04.13.07	Pendapatan dari Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas - LO									-	-
8.1.04.14	Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum - LO									-	-
8.1.04.14.02	Fasilitas Umum - LO									-	-
8.1.04.15	Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO									-	-
8.1.04.15.01	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LO									-	-
8.1.04.15.02	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LO									-	-
8.1.04.18	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO									-	-
8.1.04.18.01	Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO									-	-
8.1.04.20	Pendapatan BLUD - LO									-	-
8.1.04.20.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO									-	-
8.1.04.21	Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya - LO									-	-
8.1.04.21.01	Penerimaan lain-lain SKPD - LO									-	-
8.1.04.21.04	Penerimaan Dari Bagian Penjualan Hasil Kerajinan Kelompok Binaan - LO									-	-
	Hasil penerimaan ganti rugi aset tidak bergerak									-	-
8.1.04.22	Hasil Dari Pengelolaan Dana Bergulir - LO									-	-
8.1.04.22.01	Hasil Dari Pengelolaan Dana Bergulir - LO									-	-
8.1.04.23	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO									-	-
8.1.04.23.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO									-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah									2.236.180.000,00	1.812.174.800,00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER										
8.2.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LO										
8.2.01.01	Bagi Hasil Pajak - LO										
8.2.01.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan - LO										
8.2.01.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi - LO										
8.2.01.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO										
8.2.01.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO										
8.2.01.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO										
8.2.01.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi - LO										
8.2.01.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi - LO										
8.2.01.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi - LO										
8.2.01.02.11	Bagi Hasil Dari Minerba - LO										
8.2.01.03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO										
8.2.01.03.01	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO										
8.2.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO										
8.2.01.04.18	DAK Bidang Pendidikan - LO										
8.2.01.04.08	DAK Bidang Kesehatan - LO										
8.2.01.04.01	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LO										
8.2.01.04.02	DAK Bidang Infrastruktur Iriqasi - LO										
8.2.01.04.09	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO										
8.2.01.04.15	DAK Bidang Pertanian - LO										
8.2.01.04.06	DAK Bidang Kehutanan - LO										
8.2.01.04.20	DAK Bidang Pariwisata - LO										
8.2.01.04.21	DAK Bidang Energi Sumber Daya Mineral - LO										
8.2.02	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA-LO										
8.2.02.02	Dana Penyesuaian - LO										
8.2.02.02.02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO										
8.2.02.02.03	Dana Insentif Daerah - LO										
8.2.02.02.05	Bantuan Operasional Sekolah - LO										
8.2.02.02.06	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK dan BOKB) - LO										
8.2.02.02.07	Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan - LO										
8.2.02.02.08	Bantuan Kependudukan dan Catatan Sipil - LO										
8.2.03	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA-LO										
8.2.03.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO										
8.2.03.03.02	Pendapatan Bagi Hasil Kabupaten (Ketep Pass) - LO										
	Jumlah Pendapatan Transfer										
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO										
8.3.01	Pendapatan Hibah - LO										
8.3.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah - LO										
8.3.01.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah - LO										
0,34	Pendapatan Lainnya - LO										
8.3.03.01	Pendapatan Lainnya - LO										
8.3.03.01.01	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga - LO										
	Penerimaan Penghargaan Prestasi Kinerja Keuangan Daerah Terbaik Nasional										
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah										
	JUMLAH PENDAPATAN									2.236.180.000,00	1.812.174.800,00
9,00	BEBAN										
9.1	BEBAN OPERASIONAL										
	Beban Pegawai									#####	98.808.534.150,00
9.1.01	Beban Pegawai									#####	98.808.534.150,00
9.1.01.01	Gaji dan Tunjangan									40.695.277.339,00	36.779.365.492,00
9.1.01.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi									32.200.741.700,00	28.705.818.500,00
9.1.01.01.02	Tunjangan Keluarga									2.781.976.860,00	2.666.359.612,00
9.1.01.01.03	Tunjangan Jabatan									1.604.375.000,00	1.476.010.000,00
9.1.01.01.04	Tunjangan Fungsional									33.630.000,00	53.076.000,00
9.1.01.01.05	Tunjangan Fungsional Umum									1.302.395.000,00	1.237.925.000,00
9.1.01.01.06	Tunjangan Beras									1.590.632.880,00	1.421.097.660,00
9.1.01.01.07	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus									123.925.711,00	120.403.778,00
9.1.01.01.08	Pembulatan Gaji									416.174,00	393.251,00
9.1.01.01.10	Uang Paket									-	-
9.1.01.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah									-	-
9.1.01.01.12	Tunjangan Komisi									-	-
9.1.01.01.13	Tunjangan Badan Anggaran									-	-
9.1.01.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan									-	-
9.1.01.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya									-	-
9.1.01.01.16	Tunjangan Perumahan									-	-
9.1.01.01.17	Uang Jasa Pengabdian									-	-
9.1.01.01.18	Dana Operasional Pimpinan DPRD									-	-
9.1.01.01.19	Iuran BPJS Kesehatan									907.691.212,00	806.766.296,00
9.1.01.01.20	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian									149.492.802,00	253.215.236,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja									-	9.575.040,00
	Iuran Jaminan Kematian									-	28.725.119,00
9.1.01.01.21	Tunjangan Transportasi									-	-
9.1.01.01.22	Tunjangan Reses									-	-
9.1.01.02	Tambahan Penghasilan PNS									51.138.676.835,00	49.621.114.160,00

KODE REKENING	URAIAN	NERACA AKHIR 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	KOREKSI		MUTASI/PENYESUAIAN		NERACA AKHIR 31 DESEMBER 2018	LAPORAN REALISASI ANGGARAN		LAPORAN OPERASIONAL	
			DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT		2017	2018	2017	2018
	JUMLAH BEBAN				-	-				#####	220.884.920.988,44
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL				-	-				#####	#####
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				-	-				-	-
	SURPLUS NON OPERASIONAL				-	-				-	-
8.3	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				-	-				-	-
8.3.01	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				-	-				-	-
8.3.01.01	Surplus Penjualan Aset Tanah - LO				-	-				-	-
8.3.01.01.01	Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO				-	-				-	-
8.3.01.01.02	Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO				-	-				-	-
8.3.01.01.03	Surplus Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO				-	-				-	-
8.3.01.01.04	Surplus Penjualan Investasi jangka Panjang - LO				-	-				-	-
8.3.01.01.05	Surplus Penjualan Aset Lain-lain - LO				-	-				-	-
8.3.01.01.06	Surplus Penjualan Aset Lain-lain - LO				-	-				-	-
8.3.03	Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya				-	-				-	-
8.3.03.01	Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya				-	-				-	-
8.3.03.03.01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO				-	-				-	-
8.3.03.03.02	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO				-	-				-	-
9.3	DEFISIT NON OPERASIONAL				-	-				-	-
9.3.01	Defisit Penjualan Aset Non Lancar				-	-				-	-
9.3.01.01	Defisit Penjualan Aset Non Lancar				-	-				-	-
9.3.01.01.01	Defisit Penjualan Aset Tanah - LO				-	-				-	-
9.3.01.01.02	Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO				-	-				-	-
9.3.01.01.03	Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO				-	-				-	-
9.3.01.01.04	Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO				-	-				-	-
9.3.01.01.05	Defisit Penjualan Investasi jangka Panjang - LO				-	-				-	-
9.3.01.01.06	Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO				-	-				-	-
9.3.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya				-	-				-	-
9.3.03.01	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya				-	-				-	-
9.3.03.03.01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO				-	-				-	-
9.3.03.03.02	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO				-	-				-	-
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				-	-				-	-
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				-	-				#####	#####
	POS LUAR BIASA				-	-				-	-
8.4	PENDAPATAN LUAR BIASA				-	-				-	-
8.4.01	Pendapatan Luar Biasa				-	-				-	-
8.4.01.01	Pendapatan Luar Biasa				-	-				-	-
8.4.01.01.01	Pendapatan Luar Biasa				-	-				-	-
9.4	BEBAN LUAR BIASA				-	-				-	-
9.4.01	Beban Luar Biasa				-	-				-	-
9.4.01.01	Beban Luar Biasa				-	-				-	-
9.4.01.01.01	Beban Bencana Alam				-	-				-	-
	JUMLAH POS LUAR BIASA				-	-				-	-
	SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL				-	-				#####	#####